



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A
SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Diplomasi Indonesia Dalam Pemebentukan *Regional*
***Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* Tahun**
2012-2019

Skripsi

Oleh
Aditya Imansyah
2016330113

Bandung
2021



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A
SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Diplomasi Indonesia Dalam Pemebentukan *Regional*
***Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* Tahun**
2012-2019

Skripsi

Oleh
Aditya Imansyah Ismawan
2016330113

Pembimbing

Dr. Adelbertus Irawan Justiniarto Hartono, Drs., M.A.

Bandung

2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Aditya Imansyah Ismawan
Nomor Pokok : 20116330113
Judul : *Diplomasi Indonesia Dalam Pembentukan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Tahun 2012-2019*

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 26 Januari 2021
Dan dinyatakan **LULUS**

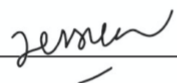
Tim Penguji
Ketua sidang merangkap anggota
Giandi Kartasasmita, S.IP., MA

: 

Sekretaris
Dr. A. Irawan J.H

: 

Anggota
Jessica Martha, S.IP., M.I.Pol.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aditya Imansyah

NPM : 2016330113

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul : Diplomasi Indonesia Dalam Pembentukan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) Tahun 2012-2019

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulisan ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 13 Januari 2020



Aditya Imansyah

ABSTRAK

Nama : Aditya Imansyah Ismawan
NPM : 2016330113
Judul Skripsi : Diplomasi Indonesia Dalam Pembentukan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) Tahun 2012-2019

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) merupakan sebuah perjanjian dagang regional yang dibentuk oleh ASEAN guna memperkuat hubungan perdagangan dengan mitranya. Perundingan mengenai RCEP mulai dilakukan dari tahun 2012 dan akhirnya selesai pada tahun 2020 silam. Terdapat 16 negara anggota dengan latar belakang yang berbeda-beda yang tergabung dalam perundingan ini. Dalam pelaksanaannya perundingan RCEP memiliki banyak halangan dan juga permasalahan yang terjadi sehingga memakan waktu yang cukup lama.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Diplomasi Indonesia dalam pembentukan RCEP. Dalam analisis, penulis mengacu pada 3 kerangka pemikiran utama yaitu teori neoliberalisme, teori Diplomasi ekonomi, dan teori integrasi ekonomi

Penelitian ini menemukan beberapa upaya yang dilakukan Indonesia untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu permasalahan tersebut adalah perbedaan latar belakang ekonomi yang beragam yang menyebabkan munculnya proteksi yang dilakukan oleh beberapa negara anggota selama perundingan berlangsung. Penelitian ini melihat bagaimana Indonesia sebagai ketua perundingan RCEP menghadapi permasalahan yang terjadi hingga akhirnya permasalahan tersebut dapat teratasi dan perundingan dapat diselesaikan.

Kata Kunci: *RCEP, ASEAN, Indonesia, Diplomasi, Ketimpangan, Proteksi*

ABSTRACT

Name : Aditya Imansyah Ismawan
Student Number : 2016330113
Title : Indonesian Diplomacy in Establishing *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) 2012-2019

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) is a regional trade agreement formed by ASEAN to strengthen trade relations with its partners. Negotiations regarding RCEP began in 2012 and finally ended in 2020. There are 16 member countries with different backgrounds who are involved in these negotiations. In the implementation of the RCEP negotiations, there were many obstacles and problems that occurred that's why it's taking quite a long time.

This study aims to explain Indonesia's diplomacy in the formation of RCEP. In the analysis, the author refers to 3 main frameworks of thought, namely neoliberalism theory, economic diplomacy theory, and economic integration theory.

This study found several factors that caused the problems that occurred. One of these factors is the difference in various economic backgrounds which led to the emergence of protection by several member countries during the negotiations. This research looks at how Indonesia as the chairman of the RCEP negotiations faces the problems that occur until these problems can be resolved and the negotiations can be done.

Keywords: RCEP, ASEAN, Indonesia, Diplomacy, Gap, Protection

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pimpinan dalam setiap langkah kehidupan penulis, hingga akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktu-Nya. Penelitian ini menjelaskan mengenai Diplomasi Indonesia dalam pembentukan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) tahun 2012-2019. Perundingan ini bukanlah perundingan yang mudah. Terdapat 16 negara dengan latar belakang negara yang berbeda-beda. Banyak sekali permasalahan yang terjadi selama perundingan ini dilakukan. Melalui penelitian ini penulis melihat usaha yang dilakukan Indonesia selaku ketua perundingan RCEP dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Perundingan ini cukup lama dilakukan dari tahun 2012 hingga selesai pada 2020 lalu. Kerjasama ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi Indonesia dan juga bagi seluruh negara anggota RCEP.

Melalui tulisan ini, penulis mengucapkan Terima Kasih kepada Mas Dr. Adelbertus Irawan Justiniarto Hartono, Drs., M.A. selaku Dosen Pembimbing. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberi dukungan, hingga penyelesaian skripsi ini. Menyadari bahwa penelitian ini belum sempurna dan masih membutuhkan perbaikan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka akan kritik, saran, maupun masukan yang membangun terkait dengan penelitian ini. Terima Kasih.

Penulis

Aditya Imansyah Ismawan

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR AKRONIM.....	vi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	3
1.2.1. Deskripsi Masalah.....	3
1.2.2. Pembatasan Masalah.....	5
1.2.3. Perumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	6
1.4. Kajian Pustaka.....	6
1.5. Kerangka Pemikiran.....	12
1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	20
1.6.1. Metode Penelitian.....	20
1.6.2. Teknik Pengumpulan Data.....	20
BAB II: <i>Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)</i>.....	21
2.1. <i>Regional Comprehensive Economic Partnership</i>.....	21
2.1.1. Latar Belakang Pembentukan RCEP.....	21
2.1.2. <i>Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)</i> <i>Guiding Principle</i>	23
2.1.2. Tujuan Pembentukan RCEP.....	26
2.2. Keuntungan Pembentukan RCEP.....	28
2.2.1. Manfaat Untuk Anggota RCEP.....	28
BAB III: Diplomasi Indonesia Dalam Mendukung Pembentukan <i>Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)</i>.....	30

3.1.	Indonesia Dalam Mendukung Regionalisme Ekonomi.....	30
3.1.1.	Indonesia dalam <i>ASEAN Free Trade Agreement</i>	33
3.1.2.	Indonesia dalam <i>ASEAN Economic Community</i>	33
3.2	Keuntungan RCEP Bagi Indonesia.....	34
3.3.	Permasalahan dalam RCEP.....	38
3.3.1.	Proteksi sebagai Isu utama dalam RCEP.....	40
3.4.	Penganganan Masalah Dalam RCEP.....	45
3.5	Diplomasi Indonesia Dalam RCEP.....	47
BAB VI: Kesimpulan.....		53
DAFTAR PUSTAKA.....		57

DAFTAR AKRONIM

AEC	<i>ASEAN Economic Community</i>
AFTA	<i>ASEAN-Free Trade Agreement</i>
AIIB	<i>Asian Infrastructure Investment Bank</i>
APEC	<i>Asia-Pacific Economic Partnership</i>
APT	<i>ASEAN Plus Three</i>
ASEAN	<i>Association of South East Asian Nation</i>
BAPEKSTA	Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan
CEPT-AFTA	<i>Common Effective Preferential Tarrifs for ASEAN Free Trade Agreement</i>
CMLV	<i>Cambodia, Myanmar, Laos, Vietnam</i>
CPO	<i>Crude Palm Oil</i>
EU	<i>European Union</i>
FDI	<i>Foreign Direct Investment</i>
FTA	<i>Free Trade Agreement</i>
GATS	<i>General Agreement on Trade in Services</i>
GATT	<i>General Agreement on Tariffs and Trade</i>
GDP	<i>Gross Domestic Product</i>
HI	Hubungan Internasional
KTT	Konferensi Tingkat tinggi
MEA	Masyarakat Ekonomi ASEAN
OPEC	<i>Organization of the Petroleum Exporting Countries</i>
RCEP	<i>Regional Comprehensive Economic Partnership</i>
ROO	<i>Rules of Origin</i>
SBY	Susilo Bambang Yudhoyono

TNC	<i>Transnational Company</i>
TRIPS	<i>Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>
UE	Uni Eropa
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
WTO	<i>World Trade Organization</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam memenuhi kebutuhannya sebuah negara perlu melakukan kerja sama perdagangan dengan negara lain. Karena setiap negara tidak akan bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Apabila dalam suatu negara terdapat kekurangan produk, barang ataupun komoditas tertentu, maka negara tersebut akan melakukan impor dari negara lain yang memiliki produk tersebut lebih banyak dan mungkin dengan harga yang lebih murah. Hal tersebut akan menguntungkan kedua belah pihak, baik negara yang melakukan impor maupun yang melakukan ekspor. Negara yang melakukan impor akan mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah dengan kualitas yang mungkin lebih baik. Sedangkan bagi negara yang melakukan ekspor, maka negara tersebut akan mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut.¹

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan suatu negara semakin beragam dan semakin sulit untuk dipenuhi. Maka dari itu, semakin banyak pula kerjasama perdagangan antar negara. Seperti *Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)*, *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)*, *European Union (EU)*, *Association of SouthEast Asia Nation (ASEAN)*, dan masih banyak lagi. Masing-masing kerjasama ini memiliki fokus yang berbeda-beda. Seperti OPEC berfokus kepada perdagangan minyak dunia, ASEAN dan EU fokus kepada perdagangan ekonomi. Namun disamping organisasi perdagangan internasional, ada juga yang disebut sebagai *Free Trade Agreement (FTA)*. Free Trade Agreement merupakan sebuah bentuk perjanjian kerjasama perdagangan antar suatu negara atau dalam suatu kawasan

¹ G. V. Vijayasri, "The Importance of International Trade in The World", *International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research*, Vol. 2 No.9, September 2013 hal 112-113

tertentu.² ASEAN memiliki FTA dengan beberapa negara yang merupakan mitranya. Seperti ASEAN – Tiongkok, ASEAN – Korea, ASEAN – Jepang, dan negara lainnya. Hal ini ditujukan untuk memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi perdagangan antar negara. Hal ini juga bertujuan untuk menghilangkan hambatan perdagangan seperti tarif dan yang lainnya.³

Saat ini ASEAN sedang menggalakan FTA baru dengan beberapa negara lainnya. Kerjasama ini disebut dengan *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*. Gagasan Awal pembentukan kerja sama ini pertama kali diutarakan oleh Indonesia. Kerjasama ini adalah salah satu inisiatif untuk tetap mewujudkan *ASEAN Centrality*. Gagasan ini juga disampaikan karena Tiongkok dan Jepang akan membuat kerja sama *East Asia Free Trade Agreement (ASEAN+3)* oleh Tiongkok dan *Closer Economic Partnership in East Asia (ASEAN+6)* oleh Jepang. Sebelum adanya kerja sama ini, ASEAN sudah memiliki *Free Trade Agreement (FTA)* dengan seluruh negara yang tergabung dalam RCEP. Namun dengan adanya RCEP ini bukan berarti ASEAN meniadakan perjanjian kerjasama yang telah ada tersebut, kembali lagi kepada tujuan awal bahwa kerja sama ini ditujukan untuk meningkatkan transparansi dan juga penghapusan tarif perdagangan antar negara anggota. RCEP juga diharapkan memberikan manfaat lain seperti adanya kemudahan negara anggota untuk mendapatkan pasokan bahan baku terutama bagi Indonesia nantinya. Pembentukan kerja sama RCEP akan menjadikan kawasan regional sebagai pusat perdagangan dunia.⁴

² Ragimun, “Kerja Sama Perdagangan Barang Pada Forum RCEP Bagi Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 09 No. 1 Juni 2018 hal.67-81

³ G. V. Vijayasri, “The Importance of International Trade in The World”, *International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research*, Vol. 2 No.9, September 2013

⁴ Ragimun, “Kerja Sama Perdagangan Barang Pada Forum RCEP Bagi Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 09 No. 1 Juni 2018 hal.67-81

1.2 Identifikasi Masalah

1.2 Deskripsi Masalah

Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP pertama kali dibentuk pada ASEAN Summit tahun 2012 di Kamboja. Namun sebelum itu, ide pembentukan RCEP ini dicetuskan pada KTT ASEAN ke-19 pada tahun 2011 dimana saat itu Indonesia menjadi ketua ASEAN di tahun 2011.⁵ Selain itu, Indonesia juga ditunjuk sebagai negara koordinator untuk RCEP dan ketua komite perundingan RCEP sekaligus sebagai ketua perunding untuk ASEAN.⁶ Pencetusan kerjasama baru ini dinilai Indonesia dapat memberikan peluang yang besar untuk kemajuan perdagangan Indonesia dan juga ASEAN. Kerjasama ini dapat membuka akses ekspor produk-produk unggulan Indonesia dan juga masuknya investasi asing di beberapa sektor khususnya sektor Industri.⁷

Pembentukan RCEP oleh ASEAN salah satu alasannya adalah untuk melancarkan perdagangan dengan enam mitra ASEAN yang juga tergabung dalam RCEP. Forum ini dibentuk dilandasi oleh pilar keempat Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yaitu *integration into the global economy* dimana ASEAN berusaha untuk masuk kedalam dan menjadi bagian dari tatanan ekonomi global. Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dibentuk ASEAN dengan tujuan untuk menghapuskan tarif dan hambatan non tarif serta memfasilitasi dan meningkatkan transparansi antar anggota. Anggota RCEP berjumlah 15 negara yang terdiri dari

⁵ WBP, "Mendag Paparkan Posisi RI Sebagai Pencetus RCEP", *Beritasatu.com*, 3 November 2019, diakses pada 19 Februari 2020

<https://www.beritasatu.com/ekonomi/583354/mendag-paparkan-posisi-ri-sebagai-pencetus-rcep>

⁶ Ibid

⁷ Yustinus Andri DP, "Menilik Posisi Indonesia di Kerjasama Dagang RCEP", *Ekonomi.bisnis.com*, 2 November 2019, diakses pada 19 Februari 2020,

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20191102/12/1166128/menilik-posisi-indonesia-di-kerja-sama-dagang-rcep>

Australia, Selandia Baru, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, serta 10 negara ASEAN.⁸ Disamping semua itu, dalam pembentukannya RCEP menghadapi beberapa masalah. Khususnya di Indonesia, diduga bahwa yang terkena dampak terbesar dari RCEP ini adalah bidang manufaktur dan juga ekspor produk Indonesia karena adanya kemungkinan untuk masuknya produk-produk impor dari luar negeri yang akan bersaing dengan produk-produk di Indonesia.⁹

Kerjasama perekonomian tidak hanya semata mata didasari oleh pembangunan ekonomi. Terdapat juga faktor politik didalamnya sebagai penggerak dan faktor penting dalam *Free Trade Agreement* (FTA) karena faktor politik adalah faktor yang membangun hubungan antar negara. Forum ini akan membahas mengenai perdagangan yang bersifat, barang, jasa, investasi, mengenai kekayaan intelektual, kompetisi, kerjasama ekonomi dan teknis serta penyelesaian sengketa. *ASEAN Centrality* adalah kunci utama dalam memperkuat kolaborasi ekonomi dalam RCEP. Karena seperti yang kita ketahui ASEAN akan berhadapan langsung dengan negara-negara yang perekonomiannya maju.¹⁰

Beberapa pihak meyakini bahwa pembentukan forum ini akan memberikan pengaruh positif untuk perekonomian bagi negara-negara di Asia Tenggara khususnya Indonesia. Diduga akan terjadi pertumbuhan ekonomi karena adanya integrasi pasar sebesar 3,2 miliar jiwa yang adalah 45% penduduk dunia dan kawasan ekonomi dengan PDB sebesar 20 triliun USD. Sebagian besar negara ASEAN merupakan negara berkembang (kecuali Singapura dan Brunei), dengan adanya RCEP ini juga diharapkan akan membantu pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang ASEAN. Namun

⁸ Ragimun, "Kerjasama Perdagangan Barang Pada Forum RCEP Bagi Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 09 No. 1 Juni 2018 hal.67-81

⁹ Ibid

¹⁰ Ranti Yulia Wardani dan Nawalge S. Cooray, "Saving Potential of Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): Implication for China and Japan, *Journal of Economic Info*, Vol 6 No 1; 34-42

produk-produk ekspor unggulan Indonesia dituntut untuk melakukan efisiensi agar dapat bersaing. Apabila efisiensi terus dilakukan maka tidak menutup kemungkinan kualitas barang yang di ekspor oleh Indonesia juga turun.¹¹

Hingga saat ini RCEP masih belum berjalan. Perundingan terakhir yang dilakukan adalah pada saat KTT ASEAN di Bangkok, Thailand pada tahun 2019 lalu. Indonesia menggunakan KTT ini untuk menyelesaikan pembahasan mengenai RCEP.¹²

1.2.2. Pembatasan Masalah:

Penelitian ini akan berfokus pada diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam upaya pembentukan kerjasama RCEP ini. Rentang waktu yang digunakan adalah tahun 2011 hingga 2019. Tahun 2011 dipilih karena Indonesia mencetuskan ide ini pada KTT ASEAN di Bali pada 2011 silam, dan 2019 dipilih karena KTT RCEP terakhir kali terjadi di Bangkok, Thailand pada tahun 2019 lalu.

1.2.3. Perumusan Masalah:

Berdasarkan identifikasi masalah, penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian berupa: Bagaimanakan diplomasi Indonesia dalam pembentukan RCEP tahun 2012-2019?

¹¹ Ragimun, “Kerja Sama Perdagangan Barang Pada Forum RCEP Bagi Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 09 No. 1 Juni 2018 hal.67-81

¹² Amanda Kusumawardhani, “KTT ASEAN ke-34: Indonesia Akan Manfaatkan Pertemuan Untuk Penyelesaian RCEP”, *ekonomi.bisnis.com*, 30.10.19, diakses pada 19.02.20, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191030/9/1165042/ktt-asean-ke-34-indonesia-akan-manfaatkan-pertemuan-untuk-penyelesaian-rcep>

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian:

1.3.1. Tujuan Penelitian:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana diplomasi Indonesia dalam membentuk kerja sama ini. Sebagai salah satu pencetus utama dari kerjasama ini, Indonesia seharusnya memiliki upaya yang cukup besar dalam pembentukan kerjasama ini.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat membantu pembaca memahami diplomasi yang dilakukan Indonesia dan kontribusi yang dilakukan Indonesia dalam pembentukan RCEP ini yang dapat dibilang masih sangat kurang dibahas. Penulis juga berharap dapat memberikan informasi terkait pembentukan kerjasama regional.

1.4 Kajian Pustaka

Dalam jurnal Kerja Sama Perdagangan Pada Forum RCEP Bagi Indonesia, Ragimun menjelaskan bahwa pembentukan RCEP merupakan wujud dari respon ASEAN terhadap dinamika Ekonomi di kawasan Asia khususnya di kawasan Asia Tenggara. Forum ini dibentuk dilandasi oleh pilar keempat Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yaitu *integration into the global economy* dimana ASEAN berusaha untuk masuk kedalam dan menjadi bagian dari tatanan ekonomi global. Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dibentuk ASEAN dengan tujuan untuk menghapuskan tarif dan hambatan non tarif serta memfasilitasi

dan meningkatkan transparansi antar anggota. Anggota RCEP berjumlah 15 negara yang terdiri dari Australia, Selandia Baru, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, serta 10 negara ASEAN.¹³

Gagasan Awal pembentukan kerja sama ini pertama kali diutarakan oleh Indonesia. Ini adalah salah satu inisiatif untuk tetap mewujudkan *ASEAN Centrality*. Gagasan ini juga disampaikan karena Tiongkok dan Jepang akan membuat kerja sama *East Asia Free Trade Agreement* (ASEAN+3) oleh Tiongkok dan *Closer Economic Partnership in East Asia* (ASEAN+6) oleh Jepang. Sebelum adanya kerja sama ini, ASEAN sudah memiliki *Free Trade Agreement* (FTA) dengan seluruh negara yang tergabung dalam RCEP. Namun dengan adanya RCEP ini bukan berarti ASEAN meniadakan perjanjian kerjasama yang telah ada tersebut, kembali lagi kepada tujuan awal bahwa kerja sama ini ditujukan untuk meningkatkan transparansi dan juga penghapusan tarif perdagangan antar negara anggota. RCEP juga diharapkan memberikan manfaat lain seperti adanya kemudahan negara anggota untuk mendapatkan pasokan bahan baku terutama bagi Indonesia nantinya. Pembentukan kerja sama RCEP akan menjadikan kawasan regional sebagai pusat perdagangan dunia.

Disamping semua itu, dalam pembentukannya RCEP menghadapi beberapa masalah. Khususnya di Indonesia, diduga bahwa yang terkena dampak terbesar dari RCEP ini adalah bidang manufaktur dan juga ekspor produk Indonesia karena adanya kemungkinan untuk masuknya produk-produk impor dari luar negeri yang akan bersaing dengan produk-produk di Indonesia.

Beberapa pihak meyakini bahwa pembentukan forum ini akan memberikan pengaruh positif untuk perekonomian bagi negara-negara di Asia Tenggara khususnya Indonesia. Diduga akan terjadi pertumbuhan ekonomi karena adanya integrasi pasar sebesar 3,2 miliar jiwa yang adalah 45% penduduk dunia dan kawasan ekonomi dengan PDB sebesar 20 triliun USD.

¹³ Ragimun, "Kerja Sama Perdagangan Barang Pada Forum RCEP Bagi Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 09 No. 1 Juni 2018 hal.67-81

Sebagian besar negara ASEAN merupakan negara berkembang (kecuali Singapura dan Brunei), dengan adanya RCEP ini juga diharapkan akan membantu pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang ASEAN. Namun produk-produk ekspor unggulan Indonesia dituntut untuk melakukan efisiensi agar dapat bersaing. Apabila efisiensi terus dilakukan maka tidak menutup kemungkinan kualitas barang yang di ekspor oleh Indonesia juga turun.

Pada *Journal Saving Potential of Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): Implication for China and Japan* ini Ranti Yulia Wardani dan Nawalge S. Cooray menjelaskan bahwa salah satu tujuan pembentukan *Free Trade Agreement* (FTA) oleh ASEAN dengan 6 negara lainnya adalah untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi regional dengan pembentukan RCEP ini. RCEP Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) pertama kali digagas pada pertemuan ASEAN ke 21 pada bulan November 2012. Salah satu tujuan pembentukan RCEP adalah untuk menghasilkan kerja sama perekonomian yang berkualitas tinggi dan memberikan keuntungan bagi setiap anggotanya. Dengan kata lain, dapat mempermudah perdagangan antar negara anggotanya.¹⁴

Kerja sama perekonomian tidak hanya semata mata didasari oleh pembangunan ekonomi. Terdapat juga faktor politik didalamnya sebagai penggerak dan faktor penting dalam *Free Trade Agreement* (FTA) karena faktor politik lah yang membangun hubungan antar negara. Forum ini akan membahas mengenai perdagangan yang bersifat, barang, jasa, investasi, mengenai kekayaan intelektual, kompetisi, kerjasama ekonomi dan teknis serta penyelesaian sengketa. *ASEAN Centrality* adalah kunci utama dalam memperkuat kolaborasi ekonomi dalam RCEP. Karena seperti yang kita ketahui ASEAN akan berhadapan langsung dengan negara-negara yang perekonomiannya maju.

¹⁴ Ranti Yulia Wardani dan Nawalge S. Cooray, "Saving Potential of Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): Implication for China and Japan, *Journal of Economic Info*, Vol 6 No 1; 34-42

Sebelum adanya inisiasi kerjasama ini, ASEAN sudah memiliki kerjasama dengan masing-masing. ASEAN dengan Tiongkok pertama kali menandatangani kerjasama perdagangannya pada tahun 2002. Sedangkan ASEAN dengan Australia dan Selandia Baru pada bulan Februari 2009. ASEAN dan India meresmikan kerjasamanya juga pada tahun 2009. Kemudian ASEAN dan Jepang pertama kali menandatangani kerjasama perdagangannya pada bulan April 2008. ASEAN dan Korea Selatan menandatangani kerjasama perdagangannya tahun 2005. India pada awalnya bergabung dengan forum ini, namun seperti yang kita ketahui India keluar dari RCEP. India merasa terbebani untuk mengurangi tarif perdagangan hingga 90% termasuk kepada Tiongkok.

Tiongkok dan Jepang adalah dua negara yang menyumbangkan GDP terbesar dalam RCEP, dua negara ini selalu dianggap sebagai negara yang bersaing dengan kekuatan ekonomi dan politik yang lebih besar dibandingkan negara-negara lainnya. Negara-negara diluar ASEAN berusaha untuk menemukan titik keseimbangan dan manfaat di antara mereka. Negara-negara non anggota ASEAN ini sedang bernegosiasi untuk menemukan keseimbangan manfaat yang optimal diantara mereka. Negara-negara anggota non-ASEAN ini melakukan negosiasi dalam hal perspektif politik dan ekonomi. Kekuatan dari tawar menawar ini penting untuk keberlangsungan RCEP.

Dalam tulisannya Lukas Maximilian Muller yang berjudul *ASEAN Centrality Under Threat - The Cases of RCEP and Connectivity*, Muller menjelaskan bahwa dalam beberapa dekade terakhir posisi ASEAN sebagai aktor utama dalam susunan perjanjian di Asia Timur menjadi perbincangan oleh banyak pengamat politik dan juga ekonomi. Melihat aktor eksternal ASEAN yang kuat seperti Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, Australia, India, dan Uni Eropa dimana aktor-aktor tersebut bekerja sama dengan ASEAN serta memiliki hubungan yang baik dengannya membuat ASEAN terlihat sebagai salah satu organisasi regional yang kuat. Hal itu juga merupakan salah satu pencapaian terbesar ASEAN sebagai

organisasi regional. Menurut Muller, mayoritas forum regional yang berada di Asia Timur mengikuti bentuk dari ASEAN+ yang dibentuk tentunya oleh ASEAN. ASEAN+ merupakan kerjasama yang dilakukan oleh ASEAN dengan satu negara lainnya. Perjanjian ini dilakukan oleh ASEAN dari tahun 2005 – 2009. Namun ASEAN +1 berada dibawah perjanjian ASEAN+3 atau ASEAN Plus Three (APT) yang dibentuk karena adanya krisis finansial Asia yang terjadi pada tahun 1997. Sejak tahun itu, ASEAN+3 menjadi pusat negosiasi perekonomian Asia Timur.

Muller menjelaskan bahwa ASEAN Centrality sedang mengalami kemunduran khususnya dalam bidang perdagangan dan konektivitas. Muller menambahkan bahwa dalam perdagangan posisi ASEAN disusul oleh perkembangan dalam dunia perdagangan. Muller juga menambahkan bahwa ASEAN+1 yang dibentuk oleh ASEAN dipandang memiliki kegunaan yang sedikit. Rekan kerja sama mereka melakukan sejumlah kerjasama bilateral namun ASEAN tidak dimasukan di dalamnya. Menanggapi hal tersebut ASEAN membentuk apa yang dinamakan dengan Regional Comprehensive Partnership (RCEP) yang merupakan *Free Trade Agreements* yang berskala Macro-Regional. Muller juga menjelaskan bahwa ASEAN memiliki kesulitan untuk membentuk sebuah sentralitas dengan banyaknya kebijakan baru yang muncul.

Sejak tahun 2010, dokumen hasil KTT ASEAN selalu mengajak untuk melakukan konsolidasi mengenai posisi nya sebagai pusat di kawasan Asia Timur. Pada tahun 2019, ASEAN membentuk apa yang dinamakan dengan *ASEAN Outlook on The Indo-Pacific* dengan tujuan untuk dapat mengembalikan sentralitas yang ASEAN miliki dulunya. Namun program ini justru menimbulkan isu lama yang sudah ada di ASEAN Centrality yaitu kurangnya memberikan inovasi untuk mendukung ASEAN Centrality. Dokumen ASEAN Outlook on The Indo-Pacific tidak memberikan mekanisme internasional baru di dalamnya. Melihat penjabaran diatas ASEAN mengalami tantangan yang berat untuk dapat mempertahankan ASEAN

Centrality. Bagaimana ASEAN dapat mempertahankan posisi sentral yang sudah dimilikinya selama bertahun-tahun melawan lingkungan eksternal ASEAN yang selalu berubah.

Dalam jurnal ini Muller mengutip dari Caballero – Anthony mengenai pembagian ASEAN Centrality yang dibagi oleh Caballero – Anthony. Anthony membagi ASEAN centrality kedalam dua perbedaan yaitu Sentralitas di dalam ASEAN sendiri dan juga dan sentralitas ASEAN di lingkungan regionalnya. Selain Anthony, Muller juga mengutip lima peran ASEAN yang ditulis oleh See Seng Tan. Tan menuliskan bahwa lima peran tersebut adalah, *Regional Leader*, *Regional Convener*, *Regional Hub*, *Regional Driver of Progress*, dan *Regional Convenience*.

Namun menurut Muller, lima konsep dari Tan ini saling tumpang tindih satu dengan lainnya. Ide utama dari konsep ASEAN sebagai *The Convener Hub*, ASEAN sebagai sebuah agensi yang menyediakan forum untuk negara lain dapat berinteraksi satu sama lain dan juga mencegah terjadinya marginalisasi dari pada memberikan kepemimpinan di Asia Timur. Konsep ASEAN sebagai *Regional Leader and Driver of Progress*. Berfokus pada peran ASEAN sebagai pembuat agenda. Sedangkan konsep ASEAN sebagai *Regional Leader* melihat ASEAN sebagai sebuah organisasi yang memberikan kepemimpinan intelektual melalui kemampuannya untuk menemukan keseimbangan dalam negosiasi. Yang terakhir adalah konsep ASEAN sebagai *Regional Convenience* melihat ASEAN Centrality sebagai penentu arah bagi regionalisme di Asia Timur. Muller menambahkan bahwa dalam konsep ASEAN sebagai *Regional Convenience*, Tan hanya fokus kepada kenyamanan ASEAN saja, namun mengabaikan bahwa ASEAN Centrality juga dapat memberikan kenyamanan bagi negara lain.¹⁵

¹⁵ Lukas Maximillian Mueller, "ASEAN centrality under threat – the cases of RCEP and Connectivity", *Journal of Contemporary East Asia Studies*, Vol.8 no.02 27 November 2019.

Muller menjelaskan bahwa ada satu pemain lagi yang tidak dimasukkan kedalam lima konsep Tan mengenai ASEAN Centrality, yaitu konsep sebagai *Regional Necessity*. Konsep ini merujuk pada geografi ASEAN yang begitu luas dan populasinya yang begitu banyak dan dengan dinamika ekonominya yang sangat dinamis, maka dibutuhkan suatu organisasi yang dapat digunakan untuk aktor eksternal yang ingin melakukan perjanjian untuk masa depan.

ASEAN dapat dikatakan sangat sukses dalam membangun jaringan kerjasama di kawasan Asia Timur pada tahun 2000an dimana semua berpusat kepada ASEAN sebagai sebuah organisasi. Namun, perjanjian dengan Australia, New Zealand, Tiongkok, India, Jepang, dan Korea Selatan membuktikan bahwa ASEAN sebagai sebuah organisasi yang termarginalisasi negara-negara yang berada di Asia Timur. Banyak pengamat yang meramalkan bahwa RCEP ini adalah sebuah era baru dari ASEAN Centrality dengan ASEAN sebagai pemimpin dalam negosiasi dan juga konsolidasi berbagai perjanjian menuju kerjasama ini.

1.5 Kerangka pemikiran

Dalam membahas penelitian ini, penulis akan menggunakan teori Neo-liberalisme, Integrasi ekonomi, Diplomasi, dan konsep kepentingan nasional. Untuk membahas liberalisasi perdagangan penulis akan menggunakan teori Neoliberalisme. Neoliberalisme merupakan teori dari liberalisme klasik yang menekankan pada organisasi internasional ataupun perjanjian internasional yang dapat mempermudah adanya kerja sama internasional.¹⁶ Dibawah pengaruh teori neo-liberalisme, pakar HI mendalami kerja sama ekonomi internasional yang tidak hanya melibatkan aktor negara namun juga perusahaan-perusahaan transnasional sebagai aktor yang berperan.¹⁷ Para pemikir neoliberalisme menganggap bahwa keberadaan organisasi baik regional maupun internasional merupakan bentuk baru dari kerja sama internasional.

¹⁶ Bob Sugeng Hadiwinata, *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektif*. (Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia 2017), hlm. 107

¹⁷ *ibid*, hlm. 4

Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pemikiran ahli yang mengembangkan pemahaman ini. David A. Baldwin mengatakan bahwa teori neoliberalisme mendukung adanya liberalisasi pasar, dimana jalur-jalur perekonomian antar negara akan memiliki hambatan yang minim dan hal ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama antar negara. Baldwin juga menambahkan bahwa liberalisasi pasar dunia dapat menciptakan perdamaian dunia karena dengan adanya liberalisasi pasar, dapat menyatukan kepentingan yang dimiliki oleh negara-negara.¹⁸ Selain David Baldwin, Robert Keohane dan Joseph Nye juga memberikan pandangannya melalui buku mereka yang berjudul '*Power and Interdependence*'. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa negara dapat menghindari ancaman perang dengan membentuk sebuah kerja sama yang bersifat saling ketergantungan antar negara.¹⁹

Hingga saat ini, sudah banyak kerjasama regional maupun internasional, dan bahkan banyak organisasi internasional yang memiliki fokus utama pada perdagangan internasional. Organisasi seperti WTO, UE, atau mungkin kerjasama perdagangan seperti RCEP, atau ASEAN + 1 yang diterapkan oleh ASEAN adalah suatu bentuk kerjasama perdagangan. Selain itu, kerjasama seperti ini harus dilakukan oleh beberapa negara yang beraliansi menjadi satu, hal tersebut dapat menerapkan apa yang sudah dikatakan Baldwin mengenai perdamaian dunia.

Seperti yang kita ketahui, RCEP adalah sebuah perjanjian ekonomi internasional yang melibatkan setidaknya 15 negara. Untuk itu penulis akan menggunakan teori integrasi ekonomi untuk membahas mengenai RCEP. Jacob Viner merupakan pencetus teori integrasi ekonomi di tahun 1950. Dalam bukunya, Viner menjelaskan mengenai teori Trade Creation dan Trade Diversion. Viner menjelaskan bahwa, Trade Creation merupakan sebuah istilah yang digunakan dalam perdagangan internasional untuk menggambarkan peningkatan perdagangan

¹⁸ David A. Baldwin, *Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate*, (New York: Columbia University Press, 1993), hlm. 12

¹⁹ Robert Keohane dan Joseph Nye, *Power and Complex Interdependence*, (Boston: Scott Foresman and Company, 1989), hlm. 24-25.

yang diakibatkan oleh terbentuknya sebuah kawasan perdagangan bebas. Sedangkan trade diversion menggambarkan kondisi yang terjadi ketika impor berubah dari produsen dengan harga rendah di negara dunia ketiga menjadi impor dari produsen dengan harga yang tinggi di negara anggota kerja sama.²⁰

Setelah Viner mengeluarkan teori integrasi ekonominya pada tahun 1950, Bela Balassa mengembangkan teori tersebut dalam bukunya yang berjudul *The Theory of Economic Integration* pada tahun 1960. Balassa menyebutkan bahwa integrasi ekonomi merupakan sebuah proses dan termasuk kedalam urusan negara. Yang dimaksud oleh Balassa bahwa integrasi ekonomi sebagai sebuah proses adalah, teori ini meliputi langkah-langkah yang dirancang untuk menghapuskan diskriminasi dalam perdagangan.²¹

Balassa mengatakan bahwa untuk memahami teori integrasi ekonomi ini, perbedaan harus dilakukan antara integrasi dan kerja sama (*Cooperation*). Balassa menjelaskan bahwa kerjasama melibatkan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi diskriminasi dalam perdagangan sedangkan proses integrasi ekonomi meliputi langkah-langkah yang memerlukan penghapusan beberapa bentuk diskriminasi. Disini integrasi ekonomi dapat menjadi beberapa bentuk yang merepresentasikan berbagai tingkat dalam integrasi. Terdapat *Free Trade Area*, *Custom Union*, *Common Market*, *Economic Union*, dan *Complete Economic Integration*.²² Balassa menambahkan, bahwa dengan seiring meningkatnya integrasi ekonomi antarnegara, maka hambatan kedua pasar negara tersebut akan berkurang.

Kepentingan untuk melakukan diplomasi saat ini tidak diragukan lagi dengan semakin majunya teknologi dan semakin banyaknya kerjasama antar negara yang dilakukan. Untuk

²⁰ Jacob Viner, *the Custom Union Issues*, (New York: Carnegie Endowment for International Peace, 1950) Hlm. 45.

²¹ Bela Balassa, *The Theory of Economic Integration*, (Inggris: Richard D. Irwin, Inc, 1961), hlm.1.

²² *Ibid*, hlm.5

membahas diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam menyelesaikan RCEP penulis akan menggunakan teori Diplomasi

Terdapat beberapa tipe diplomasi yang akan dijelaskan yaitu *Politics of Pacification*, *Gunboat Diplomacy*, *Dollar Diplomacy*, *Public Diplomacy*, *Intermediary Diplomacy*, *Economic Diplomacy*, dan *Digital Diplomacy*.²³

Tipe pertama adalah *Politics of Pacification*. Inti dari tipe diplomasi ini adalah untuk pengamanan. Pengamanan yang dimaksud disini adalah ketidakinginan memperburuk ketegangan yang ada antar negara tujuan dari diplomasi ini adalah untuk mengurangi adanya konflik antar negara. Tipe Diplomasi yang kedua adalah *Gunboat Diplomacy*. Tujuan dari tipe diplomasi ini adalah untuk melakukan diplomasi dengan menunjukkan kekuatan suatu negara untuk mendapatkan mendapatkan manfaat dari sebuah kebijakan luar negeri yang dibentuk oleh negara tersebut. Dasar dari *Gunboat Diplomacy* adalah adanya pengakuan penuh legitimasi suatu negara dengan menggunakan kekuatan militer untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan adanya pengakuan legitimasi dari negara lain, sebuah negara dapat mencapai keinginannya.

Tipe diplomasi yang ketiga adalah *Dollar Diplomacy*. *Dollar Diplomacy* adalah sebuah bentuk diplomasi yang menggunakan metode-metode ekonomi untuk sebuah negara mencapai tujuannya. Diplomasi ini merupakan contoh dari ketimpangan ekonomi di negara-negara kecil dimana negara-negara kecil harus dapat mengikuti mata uang dollar dalam perdagangan internasional. Tipe diplomasi yang berikutnya adalah *Public Diplomacy*. Diplomasi ini memiliki perbedaan dengan diplomasi tradisional dimana pada diplomasi tradisional diplomasi hanya dilakukan oleh orang-orang dengan profesi tertentu. Diplomasi publik adalah usaha pemerintah suatu negara untuk mencoba mempengaruhi masyarakat negara lain. Diplomasi ini

²³ Mary Ikande, "Types of Diplomacy in International Relations", *Legit*, diakses pada 23.07.2020, <https://www.legit.ng/1131145-types-diplomacy-international-relations.html>

berusaha untuk mencapai tujuan negaranya dengan cara halus dan tidak menggunakan kekerasan. Penyelesaian masalah biasanya dilakukan melalui cara-cara non koersif.

Tipe diplomasi berikutnya adalah *Intermediary Diplomacy*. Diplomasi ini menggunakan cara-cara non kekerasan untuk menyelesaikan suatu masalah. Jenis Diplomasi berikutnya adalah *Economic Diplomacy* atau Diplomasi Ekonomi. Diplomasi ekonomi adalah sebuah ranah yang spesifik dalam diplomasi modern. Dimana negara menggunakan masalah-masalah ekonomi yang ada sebagai alat untuk melakukan kerjasama. Tujuan diplomasi ini dilakukan adalah untuk melindungi keamanan ekonomi suatu negara dan juga untuk meningkatkan daya saing ekonomi suatu negara. Jenis Diplomasi yang terakhir adalah *Digital Diplomacy*. Diplomasi ini mengedepankan adanya penggunaan internet sebagai alat untuk melakukan diplomasi. Selain itu juga tipe diplomasi ini mengedepankan media sosial sebagai alat untuk melakukan diplomasi. Tujuan utama dari diplomasi digital ini adalah untuk mempromosikan kebijakan luar negeri suatu negara dan juga pengaruh yang dibawa oleh suatu.

Dalam bukunya, Sukawarsini Djelantik menjelaskan terdapat lima jenis diplomasi yaitu diplomasi bilateral, diplomasi multilateral, diplomasi preventif, diplomasi publik, serta diplomasi ekonomi dan perdagangan.²⁴ Tipe diplomasi pertama menurut Sukawarsini Djelantik adalah *Diplomasi Bilateral*. Diplomasi bilateral mengacu pada hubungan politik dan budaya yang melibatkan setidaknya dua negara. Alternatif dari tipe diplomasi ini adalah Multilateral dan juga Unilateral. Diplomasi multilateral adalah kondisi dimana sebuah diplomasi dilakukan oleh banyak negara dan diplomasi unilateral adalah kondisi dimana suatu negara bertindak sendiri. Diplomasi bilateral memiliki fleksibilitas yang lebih besar dan memudahkan dalam mencapai kesepakatan dalam sebuah perjanjian. Tipe diplomasi yang kedua adalah *Diplomasi Multilateral*. Diplomasi multilateral lahir karena semakin banyak diplomasi yang dilakukan melalui konferensi yang didalamnya terdapat lebih dari tiga negara. Dalam tipe diplomasi ini

²⁴ Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi antara Teori & Praktik*, 2008, Yogyakarta: Graha Ilmu: 85-235

lebih banyak melakukan konferensi dengan tatap muka ataupun secara tulisan dibandingkan dengan diplomasi tulisan yang dilakukan di dalam diplomasi bilateral. Masalah yang dibahas dalam diplomasi multilateral juga memiliki cakupan yang lebih luas, namun karena banyaknya negara yang terlibat dan semua negara fokus pada isu tersebut, keberhasilan negosiasi menjadi lebih besar dalam diplomasi multilateral. Tipe diplomasi ketiga adalah *Diplomasi Preventif*. Diplomasi preventif pertama kali diperkenalkan oleh Woodrow Wilson dalam empat belas point nya (*The Fourteen Points*). Prinsip utama dari diplomasi preventif adalah membuat jarak dengan kepentingan langsung sebuah negara untuk memberikan bantuan moril maupun materil. Tujuan dari diplomasi preventif adalah untuk mencegah konflik antar negara atau antar pemerintah dengan kelompok minoritas di dalam negara, untuk mencegah perselisihan menjadi konflik terbuka, dan juga untuk memastikan jika sebuah konflik terjadi, maka penyebaran dari konflik yang terjadi adalah sekecil mungkin.

Jenis keempat yang dibahas adalah *Diplomasi Publik*. Menurut Djelantik, diplomasi publik merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan diplomasi jalur utama. Diplomasi publik mulai berkembang karena adanya peran media massa dan organisasi-organisasi internasional yang menyebabkan negara bukan lagi aktor utama untuk mencapai tujuan nasional. Salah satu tujuan utama dari diplomasi publik adalah untuk mengurangi dampak sosial, ekonomi serta budaya dari sebuah konflik yang terjadi. Walau diplomasi publik merupakan salah satu penunjang keberhasilan diplomasi jalur utama namun tetap kegunaannya bukanlah untuk menggantikan diplomasi jalur utama melainkan mendukungnya agar tujuan nasional dapat tercapai. Salah satu cara yang dilakukan oleh jenis diplomasi ini adalah dengan menumbuhkan opini di negara lain melalui interaksi dengan kelompok-kelompok kepentingan. Jenis diplomasi kelima yang dibahas oleh Djelantik adalah *diplomasi ekonomi dan perdagangan*. Jenis diplomasi ini berkembang karena para diplomat melihat urgensi untuk membangun kerjasama ekonomi antar negara. Dalam tulisannya, Djelantik menjelaskan

terdapat empat pilar dari diplomasi ekonomi yaitu, promosi perdagangan, promosi peluang investasi, menarik masuknya teknologi yang memadai, dan juga pengelolaan bantuan ekonomi. Untuk dapat menjalankan empat pilar diatas, negara-negara harus melakukan kerjasama ekonomi.

Dalam bukunya Berridge menjelaskan mengenai *Conferences, Summits, Public Diplomacy, dan Economic Commercial Diplomacy*.²⁵Tipe diplomasi yang pertama dijelaskan adalah oleh Berridge adalah *Conferences*. Berridge menjelaskan bahwa konferensi sudah ada sejak zaman kuno, namun hanya dikenal sebagai sebuah konferensi yang kacau balau penuh dengan *chaos* yang hanya dikhususkan untuk penyelesaian perdamaian. Namun pada awal abad 19 diplomasi multilateral (konferensi) mulai digunakan kembali. Diplomasi ini memiliki kelebihan yaitu berfokus pada hanya satu atau beberapa isu yang berkaitan saja. Sehingga negara yang berpartisipasi dapat menjadi lebih fokus mengutarakan pendapat serta kekhawatiran mengenai isu tersebut. Salah satu kelebihan dari diplomasi konferensi ini juga adalah penyelesaian masalah yang lebih cepat karena isu yang dibahas hanya sedikit dan sudah sangat rinci. Tipe diplomasi ini juga dianggap berhasil karena dorongan yang dapat dihasilkan dari diplomasi ini terhadap bentuk diplomasi lainnya. Tipe diplomasi kedua yang dibahas adalah *Summits*. Saat ini banyak diplomasi multilateral yang terjadi di tingkat otoritas politik tertinggi, dimana kepala negara/pemerintahan suatu negara tidak hanya berhadapan dengan kepala negara lainnya melainkan berhadapan langsung dengan organisasi internasional. *Summits* atau Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) merupakan salah satu jenis diplomasi multilateral yang khusus. Hal ini dikarenakan di dalam KTT dapat terjadi jenis diplomasi lain seperti diplomasi bilateral. Berridge membagi *Summits* kedalam dua jenis yaitu *Serial Summits* dan juga *Ad hoc Summits*. *Serial Summits* dilakukan secara rutin dan biasanya satu tahun sekali. Jenis KTT ini sangat cocok untuk membahas negosiasi yang serius dikarenakan jenis KTT ini

²⁵ G.R. Berridge, *Diplomacy Theory and Practice*, Palgrave Macmillan: 168-214

memiliki aturan dan prosedur yang baik dan juga mereka memiliki untuk menyelesaikan suatu negosiasi. Jenis KTT ini juga cocok untuk mengumpulkan informasi. Jenis yang kedua adalah *Ad hoc Summits*. Serupa dengan *Serial Summits* jenis KTT ini juga memiliki keunggulan dari durasinya. Semakin panjang maka semakin baik. Jenis KTT ini lebih diperuntukan untuk melakukan promosi dan mencari koneksi dengan negara lain.

Tipe diplomasi berikutnya yang dijelaskan adalah *Public Diplomacy* atau Diplomasi Publik. Berridge menjelaskan bahwa Diplomasi Publik adalah nama modern untuk *white propaganda*. Yang dimaksud dengan diplomasi publik adalah memberikan pengaruh langsung terhadap pemerintah negara lain. Tujuan dari dilakukannya diplomasi ini adalah untuk melakukan hal tersebut secara tidak langsung. Propaganda paling baik digunakan untuk memperkuat sikap serta mendorong tindakan yang sudah akan dilakukan dibandingkan dengan memberikan ide baru untuk dilakukan. Seringkali efektivitas propaganda di pertanyakan, namun dengan melihat kejadian lampau muncul kepercayaan bahwa propaganda telah memegang peranan penting dalam beberapa kejadian sebelumnya. Sebagai contoh adalah runtuhnya Uni Soviet. Tipe diplomasi terakhir yang dibahas adalah *Economic and Commercial Diplomacy*. Jenis diplomasi ini menjadi sebuah prioritas dalam diplomasi yang muncul pada babak kedua abad ke-20. Namun beberapa tahun belakangan menjadi marak dilakukan karena perubahan dinamika politik negara-negara di dunia. Sering kali jenis diplomasi ini dilakukan melalui konferensi diplomasi multilateral khususnya ketika isu utama yang dibahas adalah mengenai perekonomian negara. Yang membedakan diplomasi ekonomi dan diplomasi komersial adalah isu yang menjadi fokus. Diplomasi ekonomi lebih fokus terhadap isu-isu seperti bagaimana cara mempertahankan stabilitas ekonomi global dengan tingginya tingkat pengangguran atau membahas mengenai bagaimana menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan diplomasi komersial lebih fokus kepada promosi dari ekspor impor negara tersebut dan juga *Foreign Direct Investment (FDI)* yang masuk kedalam negara tersebut.

Kepentingan Indonesia dalam RCEP juga dapat dianalisa menggunakan konsep kepentingan nasional. Kepentingan nasional merupakan tujuan negara baik dalam bidang ekonomi, militer, dan lainnya. Konsep ini pertamakali dicetuskan oleh pemikir liberalisme sebelum akhirnya dikritik oleh realisme. Menurut Imanuel Kant, seorang Liberalis, perdamaian dapat dipertahankan dengan mempertimbangkan tiga faktor utama yaitu, demokrasi, organisasi internasional, serta ketergantungan ekonomi.²⁶ Keberadaan organisasi internasional dapat mengakomodasi kepentingan nasional dan menciptakan kepentingan kolektif, yang dapat diproyeksikan dalam integrasi ekonomi maupun perdagangan bebas antarnegara.

Pandangan Kant ini juga di dukung oleh Neoliberal-institusionalisme. Pandangan ini mendorong adanya integrasi untuk dapat meningkatkan kerjasama dan juga ketergantungan antar negara. Fenomena ini memperlihatkan lahirnya kembali gagasan liberalism klasik namun dalam konteks organisasi internasional dan regional.

Dalam bukunya yang berjudul *Cooperation Under Anarchy*, Kenneth Oye menyatakan bahwa terdapat kesepakatan antara realisme dan liberalisme dimana politik internasional beroperasi dalam situasi anarki yang diwarnai ketiadaan otoritas dunia sehingga cenderung berbuat sehendaknya demi mencapai kepentingan nasionalnya, namun di sisi lain juga kerjasama antar negara merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindarkan untuk terjadi.²⁷

Morgenthau menjelaskan dalam bukunya bahwa perilaku negara dalam hubungan internasional adalah untuk menjaga agar elemen-elemen kekuatan yang dimiliki oleh sebuah negara namun tetap dapat menjamin kedaulatannya di antara negara lain dan juga tetap menjaga politik di tingkat internasional tetap seimbang. Morgenthau juga menjelaskan bahwa

²⁶ Bob Sugeng Hadiwinata, *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektif*, (Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia 2017), hlm. 88

²⁷ Ibid, hal 95

kepentingan nasional merupakan kepentingan negara yang dilandaasi oleh kekuasaan yang mereka miliki.²⁸

Sehingga dapat dilihat terdapat konvergensi antara karya neoliberal institusionalisme dan juga realisme. Namun terdapat kesepakatan juga diantara mereka dimana upaya pemenuhan kepentingan nasional oleh setiap negara merupakan hal yang wajar, maka kerjasama regional dan global harus dibangun dengan tujuan untuk memberikan insentif dalam rangka pemenuhan kepentingan nasional bagi negara anggotanya.²⁹

Indonesia dalam memimpin negosiasinya memastikan untuk selalu mendapatkan keuntungan bagi seluruh negara anggota RCEP dan khususnya bagi kepentingan nasional Indonesia sendiri.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell metode ini adalah metode analisis yang mengumpulkan sumber berupa teks, bacaan, gambar, dan juga tabel.³⁰ Untuk mendukung penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif menggunakan studi kasus. Metode studi kasus digunakan untuk menganalisis pembentukan RCEP yang masih berjalan dari tahun 2012 hingga saat ini.

²⁸ Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, (New York: Alfred A. Knopf), hal 365

²⁹ Bob Sugeng Hadiwinata, *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektif*, (Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia 2017), hlm. 100

³⁰ John. W Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (California: Sage Publications, 2009), hlm. 174

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Creswell menyebutkan terdapat setidaknya empat teknik pengumpulan data. Yaitu teknik observasi, wawancara, studi pustaka, dan studi audio-visual.³¹ Penelitian ini akan menggunakan teknik studi pustaka, dimana penulis akan menggunakan buku, majalah, koran, laporan resmi, jurnal dan lain sebagainya yang terkait dengan ASEAN serta pembentukan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), sebagai data untuk melakukan penelitian ini. Selain itu penulis juga akan menggunakan sumber dari situs resmi pemerintahan (seperti situs ASEAN, situs Kementerian Luar Negeri Indonesia), dan juga situs berita daring. Penggunaan metode ini dianggap sesuai dengan teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu teks-teks yang bersumber dari situs resmi, buku, jurnal, koran, dan laporan.

³¹ John. W Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (California: Sage Publications, 2009), hlm. 179